

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di muka, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

Pertama. Gambaran nyata pendidikan dasar di Kabupaten Indramayu sampai Tahun 1998/1999 menunjukkan bahwa: Pada aspek *pemerataan*: (1) Masih terdapat 3.849 anak 7-12 tahun belum tertampung di SD/MI dan 53.517 anak usia 13-15 tahun belum tertampung di SLTP/MTs; (2) Kekurangan ruang kelas sebanyak 1.656 ruang; (3) Kekurangan guru sebanyak 1.197 orang; Aspek *mutu*: (1) Kualifikasi guru yang belum sarjana sebanyak 8.638 orang; (2) Guru yang tidak layak mengajar sebanyak 1.560 orang; (3) Masih terdapat 2.142 ruang kelas yang memerlukan rehab berat, dan 2.995 ruang kelas yang memerlukan rehab ringan; (4) Masih 37,07% sekolah yang belum memiliki perpustakaan; (5) Mutu PBM masih rendah dengan kecilnya NEM rata-rata bidang studi pada kelulusan: pada SD 6,63%; MI 6,21%; Begitu pula mutu PBM pada SLTP/MTs masih rendah yang ditandai dengan penurunan rata-rata Bidang Studi pada NEM siswa baru Kelas I dibandingkan dengan rata-rata bidang studi pada NEM kelulusan: pada SLTP dari 30,14 menjadi 27,01, pada MTs dari 28,27 menjadi 27,58; (6) Penyediaan buku pokok, pada SD baru mencapai

rasio: 1:1, dan pada MI baru mencapai rasio 1:1,15. Sedangkan pada SLTP mencapai rasio 1:1, dan MTs 1:1,5. Aspek *kesesuaian* menunjukkan masih terbatasnya jumlah dan mutu guru yang mengajar muatan lokal, dan terbatasnya jumlah, jenis dan mutu alat peraga yang dapat digunakan dalam PBM keterampilan dasar yang beraneka ragam; Aspek *tingkat pencapaian tujuan*, menunjukkan bahwa: Mutu Pengelolaan SLTP dan MTs belum optimal, yang ditandai biaya operasional yang rendah (Rp. 21.309 untuk SLTP dan Rp 13.322 untuk MTs per bulan per siswa) dan tingginya prosentase guru yang tidak layak mengajar, serta mutu sarana dan prasarana pendidikan lainnya belum baku sehingga mempengaruhi mutu proses KBM.

Kedua. Gambaran APK, APM, APS dan AM dilihat dari tingkat penghasilan kotor masyarakat setempat, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu terbagi beberapa kelompok, yaitu: (1) Masyarakat berpenghasilan tinggi dengan APK, APM dan APS rendah, terjadi di Kecamatan Indramayu dan Kandanghaur; (2) Masyarakat berpenghasilan rendah dengan APK dan APM rendah tetapi APS tinggi, terjadi di Kecamatan Kroya dan Balongan; (3) Masyarakat berpenghasilan rendah dengan APK, APM dan APS tinggi, terjadi di Kecamatan Widasari; (4) Masyarakat berpenghasilan tinggi dengan APK, APM dan AM tinggi, terjadi di daerah Kecamatan Jatibarang dan Juntinyuat; (5) Masyarakat berpenghasilan rendah dengan APK, APM dan AM rendah, terjadi di Kecamatan Bangodua, Kroya, Krangkeng dan Kecamatan Bongas.

Ketiga. Faktor utama yang menghambat peningkatan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs di Kabupaten Indramayu berkenaan dengan: (1) Keadaan ekonomi masyarakat lemah; (2) Fasilitas sekolah yang kurang memadai; (3) Rendahnya partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya; Dan (4) Kurang optimalnya Tim Koordinasi Wajar Dikdas baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dalam sosialisasi program wajib belajar.

Keempat. Strategi menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Indramayu yaitu: (1) Membentuk satuan tugas Tim Pengendali beasiswa yang berkualitas; (2) Membuka SLTP terbuka didaerah-daerah rawan drop-out (DO) khususnya daerah IDT; Dan (3) Melaksanakan Penyuluhan Terpadu. Namun, khusus dalam upaya meningkatkan angka melanjutkan sekolah lulusan SD/MI ke SLTP/MTs di Kabupaten Indramayu, diperlukan suatu *rencana strategik yang memprioritaskan pada upaya penyuluhan terpadu terhadap segenap lapisan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Wajar Dikdas dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.*

B. Implikasi

Beberapa implikasi yang dapat diambil dari kesimpulan di muka ialah:

1. Keberhasilan program Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Indramayu diukur dari tercapainya angka partisipasi masyarakat yang tinggi dan dikatakan tuntas jika APM

telah mencapai target yang ditetapkan. Secara ideal, target pencapaian APM 100% merupakan target yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Karena itu penentuan prosentase target peningkatan APM harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata masyarakat;

2. Rendahnya kuantitas APK dan APM berkaitan erat dengan tingkat penghasilan masyarakat. Namun, tidak mesti dijamin oleh keberadaan perekonomian suatu masyarakat. Karena, yang lebih menonjol dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam memahami arti pentingnya melek pendidikan;
3. Sekalipun faktor rendahnya ekonomi masyarakat, fasilitas sekolah yang kurang memadai, rendahnya partisipasi orang tua, kurang optimalnya tim koordinasi Wajar sangat berpengaruh pada APK dan APM di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi, faktor rendahnya partisipasi orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya adalah penyebab utama kecilnya perolehan APK dan APM di Kabupaten Indramayu;
4. Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat usia Wajar (7-15 Tahun), serta untuk mensukseskan tuntasnya program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Tahun 2003/2004, Kabupaten Indramayu memerlukan manajemen strategik khusus yang didasarkan pada pendekatan sosial, budaya, geografi dan ekonomi. Oleh karena itu program penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Indramayu harus cermat dalam

menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat humaniora, khususnya pada basis-basis wilayah yang APS-nya rendah. Implikasi terhadap pengembangan model perencanaan strategik peningkatan angka melanjutkan sekolah lulusan SD/MI ke SLTP/MTs di Kabupaten Indramayu, diperlukan suatu keputusan manajemen berupa rencana kegiatan yang bersifat strategik sebagai perwujudan implementasi keputusan tersebut. Tujuan primer rencana strategik ini, adalah sebagai pedoman untuk menjabarkan, memahami, dan mengkomunikasikan informasi yang akan membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam penuntasan Wajar Dikdas di Kabupaten Indramayu.

C. Rekomendasi

1. *Perlu Penyederhanaan Rumus Perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)*

Perhitungan APK dan APM merupakan permasalahan yang selalu dijadikan dasar bagi para perencana baik di daerah maupun di tingkat wilayah atau nasional, karena kedua permasalahan tersebut sering menjadi kendala khususnya bagi perencanaan dari daerah.

Hasil perhitungan APK dan APM pada perencanaan mikro, misalnya dalam menentukan kebutuhan Unit Gedung Baru/Ruang Kelas Baru (UGB/RKB), maka hasilnya tidak dapat dijadikan dasar sebagai hasil perhitungan untuk setiap kecamatan, karena mengakibatkan penumpukkan

kebutuhan pada kecamatan tertentu. Apabila APK dan APM digunakan dalam penentuan perencanaan secara makro, misalnya tentang kebutuhan UGB/RKB suatu kabupaten, maka tingkat keabsahan hasil perhitungannya bisa diterima.

APK dan APM hanya bisa dijadikan dasar penentuan kebijakan pimpinan pada tingkat wilayah dalam menentukan atau mengalokasikan kebutuhan suatu kabupaten karena terjadinya arus urban baik emigrasi maupun imigrasi masih relatif kecil. Pada kasus Kabupaten Indramayu tidak bisa mengambil suatu kebijakan tertentu dalam merekomendasi suatu usulan dari kecamatan yang didasarkan kepada bobot APK dan APM saja. Karena di kecamatan terjadinya arus urban relatif besar. Apabila masalah ini dipaksakan oleh para perencana dari daerah maka pada saat mengimplementasikannya akan mengalami masalah.

Berkaitan dengan APK dan APM tersebut, penulis *mengusulkan agar adanya perubahan rumus perhitungan APK dan APM yang bisa digunakan baik untuk tingkat wilayah maupun nasional*. Adapun sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan rumus perhitungan APK dan APM, yaitu:

$$\boxed{\text{APK} = \frac{\text{BSSK}}{\text{BPUS}}} \quad \text{Menjadi} \quad \boxed{\text{APK} = \frac{\text{BSSKB}}{\text{BPUS}}}$$

Keterangan:

- APK = Angka Partisipasi Kasar
 BSSK = Banyaknya Siswa di Sekolah suatu Kecamatan
 BPUS = Banyaknya Penduduk Usia Sekolah
 BSSKB = Banyaknya Siswa di Sekolah yang berasal dari Kecamatan Berada.

$$\boxed{\text{APM} = \frac{\text{BSUSK}}{\text{BPUS}}} \quad \text{Menjadi} \quad \boxed{\text{APM} = \frac{\text{BSUSKB}}{\text{BPUS}}}$$

Keterangan:

APM = Angka Partisipasi Murni

BSUSK = Banyaknya Siswa Usia Sekolah suatu Kecamatan

BPUS = Banyaknya Penduduk Usia Sekolah

BSSKB = Banyaknya Siswa Usia Sekolah yang ada di Sekolah yang berasal dari Kecamatan Berada

2. *Perlunya Peningkatan Profesionalisasi Guru*

Berkaitan dengan kondisi pendidikan yang tergambar dari hasil penelitian, sampai saat ini keberadaan guru di Kabupaten Indramayu masih diperlukan perhatian khusus. Melihat dari segi kuantitas dan kualitas guru di Kabupaten Indramayu, baik pada tingkatan SD/MI maupun SLTP/MTs masih sangat rawan pendidikan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan suatu produk pendidikan yang baik dan berkualitas di Kabupaten Indramayu masih sangat sulit. Hal ini menunjukkan perlunya ada pembinaan khusus bagi para guru khususnya bagi mereka yang kelayakan pengajarannya termasuk katagori tidak layak mengajar. Pembinaan khusus yang dimaksud bisa dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau memberikan beasiswa untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Peningkatan profesionalisasi guru sangat penting artinya dalam implementasi perencanaan stratejik ini. ***Guru dapat dijadikan komunikator yang paling efektif dalam memotivasi peserta didik, khususnya pada tingkat SD/MI untuk melanjutkan sekolah ke SLTP/MTs.***

3. *Perlunya Peningkatan Kemampuan Profesional Pengelola Pendidikan*

Hal yang perlu diungkap lebih jauh sehubungan dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan kemampuan jajaran pengelola pendidikan pada tingkat kabupaten dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan organisasi. Jika otonomi pendidikan benar-benar dilaksanakan dengan titik-berat pada Daerah Tingkat II, maka peranan-peranan yang selama ini dilakukan Depdikbu akan berkurang. Apakah para jajaran pengelola pendidikan di lingkungan Depdikbud dan Dinas P&K sudah mempersiapkan diri secara profesional?

Sayang sekali, penelitian ini tidak sempat mengungkap bagaimana persepsi dan sikap Tim Koordinasi Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terhadap kemungkinan terjadinya reformasi organisasi pendidikan nasional. Penulis agak sulit memprediksi kinerja para pengelola pendidikan pada tingkat kabupaten, walaupun indikator yang tampak dalam kinerja Tim Koordinasi wajar yang sangat rendah, belum dapat dijadikan pegangan untuk memprediksi kinerja dalam aspek yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka *perlu kiranya ada penelitian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kinerja para pengelola pendidikan*, baik yang menyangkut persepsi, sikap, kemampuan, maupun motivasi dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

4. *Realisasikan Program dengan Segera*

Dalam rangka percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Indramayu, program penyuluhan terpadu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak, perlu segera direalisasikan. Karena itu, *Tim Koordinasi Wajar Dikdas tingkat kabupaten, khususnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu sebagai penanggungjawab, seyogyanya segera menentukan kebijakan-kebijakan* sebagai panduan Tim Koordinasi Wajar Dikdas dalam melakukan langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait baik secara horiozontal maupun vertikal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Kebijakan bupati tersebut sangat diperlukan dalam menentukan langkah-langkah koordinasi, sehingga setiap instansi yang terkait dapat menentukan langkah-langkah operasional dengan segera.



